

RINGKASAN

Tiara Indriyani
220510282

**PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM
MENANGANI TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL OLEH GURU
PESANTREN (STUDI PENELITIAN DI
POLRES LABUHANBATU)**
**(Zulfan, S.H., M.Hum., dan Dr. Shira Thani,
S.H., M.H.)**

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru pesantren terhadap santri merupakan persoalan serius yang berdampak fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Relasi kuasa antara guru pesantren dan santri menyebabkan kasus ini sering sulit diungkap dan terlambat dilaporkan. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur peran dan kewajiban aparat penegak hukum dalam menangani perkara serta melindungi korban, penanganannya masih menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran aparat kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru pesantren di Polres Labuhanbatu serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam penanganannya. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polres Labuhanbatu serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif (*descriptive analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aparat Kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual oleh guru pesantren telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1), melalui penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan korban, pengumpulan alat bukti, pemberian perlindungan kepada korban, dan koordinasi dengan pihak terkait. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa korban yang takut melapor, tekanan lingkungan, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindak pidana kekerasan seksual. Upaya yang dilakukan kepolisian meliputi pendekatan persuasif kepada korban dan keluarga, koordinasi dengan pihak terkait, serta pemberian pendampingan dalam proses hukum. Oleh karena itu disarankan agar aparat kepolisian lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait tindak pidana kekerasan seksual serta memperkuat upaya perlindungan terhadap korban dalam proses penegakan hukum.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Guru Pesantren.

SUMMARY

Tiara Indriyani
220510282

***The Role Of The Police In Handling The Crime
Of Sexual Violence Committed By Islamic
Boarding School Teachers (A Research Study At
The Labuhanbatu Police Resort)***
**(Zulfan, S.H., M.Hum., and Dr. Shira Thani,
S.H., M.H.)**

The crime of sexual violence committed by Islamic boarding school teachers against students is a serious issue that has physical, psychological, and social impacts on the victims. The power imbalance between teachers and students often makes these cases difficult to uncover and results in delayed reporting. Although Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence have regulated the roles and obligations of law enforcement officers in handling such cases and protecting victims, their implementation still faces various obstacles. Therefore, this study aims to analyze the role of the police in handling cases of sexual violence committed by Islamic boarding school teachers at the Labuhanbatu Police Resort and to identify the obstacles encountered and the efforts undertaken in handling these cases. This research employs an empirical legal research method using a case approach. The data used consist of primary data obtained through interviews with parties involved in handling criminal acts of sexual violence at the Labuhanbatu Regional Police Office, as well as secondary data obtained through library research, including laws and regulations, books, journals, and other documents relevant to the study. Data analysis was conducted using descriptive analysis. The results of the study show that the role of the police in handling sexual violence cases committed by Islamic boarding school teachers has been carried out based on Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, particularly Article 13 and Article 14 paragraph (1), through receiving reports, conducting inquiries and investigations, examining victims, collecting evidence, providing protection to victims, and coordinating with relevant parties.. However, in its implementation, several obstacles were found, such as victims being afraid to report, social pressure, and limited public understanding of sexual violence crimes. The efforts made by the police include persuasive approaches to victims and their families, coordination with related institutions, and providing assistance during the legal process. Therefore, it is recommended that the police improve public awareness programs regarding sexual violence crimes and strengthen victim protection efforts during the law enforcement process.

Keywords: Police Role, Crime, Sexual Violence, Islamic Boarding School Teacher.